



Aliansi Meratus Sebagai Gerakan Sosial “Perlawanan” Warga Negara Pro-Lingkungan Di Kalimantan Selatan; Perspektif Kewarganegaraan Ekologis

Sarbaini ✉¹, Reja Fahlevi ✉²

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima April 2022 Revisi Mei 2022 Dipublikasikan Juni 2022</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menuliskan bagaimana sepak terjang dan peran gerakan sosial Aliansi Meratus yang merupakan gerakan perlawanan pro lingkungan di Kalimantan Selatan sebagai wujud gerakan kewarganegaraan ekologis. Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif. Populasi adalah Gerakan Aliansi Meratus, informan kunci ditentukan secara purposive sampling, yaitu aktivis Gerakan Aliansi Meratus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Aliansi Meratus muncul karena kepedulian berbagai elemen tokoh masyarakat yang berjuang agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi Meratus adalah wadah perlawanan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, menyuarakan agar tidak terjadi tukar guling lahan, apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan, serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat dan lingkungan pegunungan Meratus. Peran Gerakan Aliansi Meratus adalah wadah yang memberikan kesadaran dan penguatan; kampanye dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat; penelusuran ke lembaga-lembaga, instansi maupun akademisi untuk mencari dukungan; melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan; melakukan Aksi dan Pernyataan Sikap sebagai wujud perlawanan dan ketidaksetujuan masyarakat untuk menolak tegas segala macam bentuk eksploitasi terhadap hutan Meratus, yang dilakukan di balai-balai Adat maupun aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi; dan membuat event festival-festival kesenian baik teater maupun festival baca puisi yang bertemakan tentang Meratus.</p>
<p>Keywords: Aliansi Maratus Gerakan Sosial Kewarganegaraan Ekologis</p>	<p>ABSTRACT <i>Meratus Alliance as a Social Movement "Resistance" of Pro-Environmental Citizens in South Kalimantan; Ecological Citizenship Perspective.</i> The purpose of this research is to write about the actions and roles of the Meratus Alliance social movement which is a pro-environment resistance movement in South Kalimantan as a form of the ecological tourism movement. The research approach is qualitative research. The population is the Meratus Alliance Movement, the key informants are determined by purposive sampling, namely the Meratus Alliance Movement activists. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation studies. The results of the study show that the Meratus Alliance emerged because of the concern of various elements of the community who were struggling to prevent swapping of the Meratus area with the PT Kodeco area. The Meratus Alliance Movement is a forum of resistance that fights for the rights of the community, so that there is no land swap, if it occurs it can damage the environmental ecosystem, as well as eliminate the traditions and customs of the people and the Meratus mountain environment. The role of the Meratus Alliance Movement is to provide awareness and support; campaigns and outreach to gain community support; tracing to institutions, agencies and academics to seek support; conduct studies on regulations to conduct scientific research on policies; carry out Actions and Statements of Attitudes as a form of resistance and disapproval of the community to reject all forms of exploitation of the Meratus forest, which are carried out in Customary halls as well as actions carried out in front of the Regency and Provincial DPRD Buildings; and organize art festivals, both theater and poetry reading festivals with the theme of Meratus.</p>
<p>How to Cite : Sarbanini. (2022). Aliansi Meratus Sebagai Gerakan Sosial “Perlawanan” Warga Negara Pro-Lingkungan Di Kalimantan Selatan; Perspektif Kewarganegaraan Ekologis. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 7(2), pp. 1-6. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v7.n2.2022.pp1-6</p>	

✉ **Alamat korespondensi:**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

✉ **E-mail:**

PENDAHULUAN

Isu kerusakan lingkungan sudah menjadi isu global serta menjadikan persoalan lingkungan sebagai prioritas dalam mengambil kebijakan. Penyebab kerusakan lingkungan, terjadi karena faktor seleksi alam, namun berdasarkan teori-teori, umumnya karena faktor penyebab ulah tangan manusia sendiri yang dengan sengaja merusak alam dan lingkungan. (Fahlevi 2021), (Takashi Inoguchi 2003).

Semakin banyak kerusakan lingkungan, semakin banyak muncul gerakan perlindungan lingkungan serta konferensi-konferensi yang membahas tentang isu kerusakan lingkungan, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan ataupun institusi-institusi pemerintahan, maupun oleh gerakan bawah (*grassroots*) dan kelompok kepentingan, seperti LSM, seniman, dan satrawan yang memiliki perhatian pada masalah lingkungan. (Rahman 2015). Munculnya gerakan-gerakan yang dilakukan untuk mengelola lingkungan hidup adalah gerakan sosial sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dipergunakan untuk menciptakan perubahan lingkungan yang lebih baik. Alasan lain, banyaknya kemunculan gerakan sosial lingkungan hidup karena disebabkan negara tidak mampu untuk mewujudkan kesadaran dalam bentuk kebijakan yang startegis terhadap lingkungan. (Hidayat 2017; Crowson and Cs 2009).

Gerakan sosial dianggap sumber harapan (Offe dan Melucci, dalam (Sudjatmiko 2006), karena memperjuangkan atau mengejar kepentingan, aspirasi, maupun tujuan bersama, diikat suatu identitas kolektif (Diani dan Bison, dalam (Sudjatmiko 2006), atas dasar rasa solidaritas sosial dan interaksi sosial yang berkelanjutan, antara para elit, penentang dan pemegang wewenang (Tarrow 1998), melalui tindakan kolektif (Giddens 1993), menuntut perubahan, dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan (Borgatta dan Marie, dalam (Sudjatmiko 2006); (Martono, dan Harjito 2005) Tuntutan yang dilakukan berupa gerakan kolektif yang dilakukan massa untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan atau aturan-aturan tertentu.

Kondisi lingkungan Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini menjadi perhatian dan memprihatinkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa luas hutan

Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari tahun 1990 – 2019 sebesar 62,8%. Dengan sisa jumlah proporsi luas hutan alam, hanya tersisa 14% saja dengan ditambah luas hutan tanaman 3,2%. (KLHK, 2020). Jika dibandingkan dengan data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Kalimantan Selatan bahwa sisa hutan di Kalimantan Selatan hanya sebesar 29 % saja. Data dari WALHI Kalimantan Selatan bahwa 50% lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan kelapa sawit. Dari 3.700.000 hektare luas lahan di Kalimantan Selatan, 1.200.000 hektare lahan dikuasai oleh pertambangan, dan 620.000 hektare lahan dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit. (Walhi 2020)

Terbentuknya Aliansi Meratus tahun 1999 sebagai gerakan sosial “perlawanan” terhadap penguasaan kawasan Meratus karena adanya kepedulian dari berbagai elemen tokoh masyarakat yang terdiri ORNOP/Mapala/Kelompok Pencinta Alam (KPA) untuk memperjuangkan, agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco. Aliansi Meratus adalah wadah gerakan perlawanan terhadap ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, dan sebagai pusat gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tinggal dan lahan yang dimiliki di Pegunungan Meratus; dan Aliansi Meratus menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan di wilayah Pegunungan Meratus, apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di Pegunungan Meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Aliansi Meratus merupakan gerakan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) dan perlawanan warga negara yang menolak ketidakadilan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup (ekosistem) di atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Gerakan lingkungan merupakan salah satu cara warga negara untuk terlibat dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. (Suwarno 2000); (Silfiana 2019), dengan program-program pro-lingkungan yang digerakkan oleh warga negara baik itu komunitas maupun pribadi sendiri untuk

mencegah adanya kejahatan ekologi (Prasetyo 2016) dan bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan (Dobson 2003).

Pegunungan meratus memiliki satatus sebagai Hutan Lindung yang memberikan akses kepada bubuhan balai untuk mengelola wilayah kesatuannya dengan menggunakan sistem gilir balik. Bagi pihak lain memberikan peluang besar untuk pengembangan pariwisata petualangan di Kalimantan Selatan, mengurangi bahaya banjir, sebagai wilayah penyangga bagi masyarakat di dalam dan sekitar pegunungan Meratus. Artikel peran Gerakan Aliansi Meratus dalam melakukan perlawanan untuk menyelamatkan Hutan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah para aktivis dan Lembaga yang tergabung dalam Aliansi Meratus, sementara informan kunci adalah tokoh penggasas dan aktivis Aliansi Meratus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Validasi data melalui triangulasi teknik, sumber dan waktu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, display dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Aliansi Meratus terbentuk karena kepedulian dari berbagai elemen dari tokoh masyarakat untuk memperjuangkan agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi meratus ini juga merupakan wadah perlawanan dari ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat dan sebagai pusat gerakan yang memperjuangkan hak-hak yang sudah dimiliki masyarakat yang tinggal di pegunungan Meratus atas lahan yang mereka sendiri. Selain itu Gerakan Aliansi meratus ini menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan terjadi di wilayah pegunungan Meratus, karena apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di pegunungan Meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Berbagai usaha dan peran yang dilakukan oleh Aliansi Meratus ini sebagai gerakan sosial perlawanan adalah seperti dalam bentuk pendampingan dan advokasi untuk meyakinkan dan memperkuat hak-hak ulayat masyarakat, kampanye dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat, media, tokoh lokal, tokoh nasional, dan internasional, penelusuran ke lembaga, instansi, akademisi untuk mencari dukungan, kajian terhadap peraturan-peraturan untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan, aksi dan pernyataan sikap sebagai wujud perlawanan, ketidaksetujuan, menolak tegas eksploitasi hutan Meratus di balai-balai Adat dan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi; event festival-festival kesenian, teater maupun festival baca puisi tentang Meratus; dan menggugat ke PTUN Jakarta, Kementerian ESDM sebagai tergugat dan PT MCM sebagai tergugat intervensi, dimenangkan di Mahkamah Agung (MA).

Aliansi Meratus sebagai gerakan telah memenuhi syarat sebagai gerakan sosial, karena senada dengan (Michener 1999) yang berprinsip bahwa gerakan sosial merupakan kegiatan yang sifatnya kolektif yang menginterpretasikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. terlebih mengenai isu lingkungan. Selanjutnya, Aliansi Meratus sebagai wadah dan motor gerakan sosial merupakan suatu usaha beberapa individu yang kemudian terikat kolektif memiliki tujuan yang sama yakni untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu masyarakat. Sebagai gerakan sosial, Aliansi Meratus juga mengusung ide-ide perubahan, karena Blumer dan Allen (1998) menganggap gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan baru yang menganggap apabila suatu gerakan sosial sebagai kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi social.

Gerakan Aliansi Meratus tidak diragukan lagi adalah gerakan yang dilakukan sejumlah orang yang memiliki kepedulian dan kesadaran serta sifatnya terencana dan terorganisir dengan tujuan, yakni untuk menyelamatkan hutan Meratus dari pelaksanaan tukar guling lahan dengan PT Kudeco, kemudian menyelamatkan lingkungan fisik, sosial dan budaya Kawasan Meratus. Untuk mencapai tujuan demikian, gerakan Aliansi Meratus mengusung tagar perlawanan “SAVE MERATUS” melakukan beberapa peran berupa; pendampingan dan

advokasi; kampanye dan sosialisasi; penelusuran ke lembaga, instansi, akademisi untuk mencari dukungan; kajian ilmiah terhadap peraturan-peraturan; aksi dan pernyataan sikap sebagai wujud perlawanan; event festival-festival kesenian, teater maupun baca puisi tentang Meratus; dan menggugat ke PTUN Jakarta, Kementerian ESDM sebagai tergugat dan PT MCM sebagai tergugat intervensi, dimenangkan di Mahkamah Agung.

Peran-peran yang dilakukan oleh Aliansi Meratus dengan tagar “SAVE MERATUS” sebagai gerakan sosial berhasil dilakukan secara kolektif oleh beragam elemen dari tokoh dan aktivitis organisasi dan Lembaga sosial masyarakat, antara lain Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat Pedalaman (AMAN), Yayasan Dalas Hangit (YADAH), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA), Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Lembaga Bina Potensi (LBP).

Gerakan sosial ini dalam perspektif (Aditjohndro 2002) adalah gerakan lingkungan yang digunakan masyarakat sebagai perwujudan perubahan opini publik dan nilai-nilai peduli dengan lingkungan hidup, bahwa masyarakat harus mempunyai pengetahuan dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship). Kewarganegaraan ekologis ditentukan oleh upaya memperluas wacana kesejahteraan sosial dengan mengakui prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan hak-hak lingkungan dan memasukkannya dalam hukum, budaya dan politik sebagai politik kewajiban, untuk kelestarian erhadap ekosistem lingkungan (Dobson 2003; Smith and Pangsapa 2008) Untuk menjadi warga negara ekologis membutuhkan transformasi dalam identitas moral, yakni berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Curtin, Donovan, and Cotter 2002; Asshiddiqie 2009), terlibat dalam kegiatan politik yang bertujuan mendukung lingkungan (Takashi Inoguchi 2003), pemberdayaan orang agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan warga negara sehubungan dengan lingkungan dan untuk bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi (Berkowitz 2005)

Peran yang dilakukan Aliansi Meratus sejalan dengan tahapan pengembangan kewarganegaraan ekologis yang dilakukan World Wide Fund (WWF) Malaysia (2008), yakni terdiri dari 4 tahapan yaitu: 1) Environmental Knowledge yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan interaksi dengan alam untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu dan organisasi. 2) Environmental skills yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 3) Environmental Attitudes yaitu seperangkat nilai dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 4) Environmental Participation yaitu warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro-lingkungan. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk tercapainya masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan keterampilan. Peran inilah yang dilakukan oleh gerakan Aliansi Meratus dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat Meratus pada khususnya dalam melawan dan menolak setiap ada rencana atau tindakan yang mengancam ekosistem lingkungan mereka sebagai wujud kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship).

Masalah ekologi secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Meratus. Media massa telah membuka pengetahuan masyarakat tentang dampak dari kerusakan lingkungan ke ranah ruang publik. Oleh sebab itu, potensi dampak lingkungan diperlukan beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan jika kelestarian ekologi ingin dicapai dan dipelihara. Prinsip-prinsip ini meliputi sebagai berikut.

Pertama, keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk alasan ekologis, ekonomi dan etika. Kedua, prinsip bahwa keanekaragaman

hayati harus dilestarikan untuk alasan ekologis, ekonomi dan etika. Ketiga, prinsip keadilan antargenerasi. Keempat, prinsip procedural yang berkaitan dengan kebutuhan reflektivitas dalam pengambilan keputusan (Christoff 1995). Terlaksananya prinsip-prinsip ini tergantung pada penegakan hukum baik untuk menyediakan jaminan luas tentang hak-hak lingkungan generasi selanjutnya.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Aliansi Meratus muncul sebagai gerakan sosial “perlawanan” terhadap penguasaan kawasan Meratus adalah: adanya kepedulian dari berbagai elemen tokoh dan aktifis organisasi masyarakat yang memperjuangkan, agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco, sebagai pusat gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tinggal dan memiliki lahan di Pegunungan Meratus; agar tidak terjadi kerusakan ekosistem lingkungan di Pegunungan Meratus, yang dapat menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus. Peran-peran yang dilakukan oleh Aliansi Meratus dengan tagar “SAVE MERATUS” telah memenuhi perannya sebagai gerakan sosial “perlawanan” dan dipandang sebagai perwujudan kewarganegaraan ekologis, serta tahap-tahap pengembangan kewarganegaraan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjohndro, G J. 2002. *Kembar Siam Penguasa Politik Dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Asshiddiqie, J. 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi. Bunga Rampai, Saduran Dari Buku Green Constitution*. Jakarta: RajawaliGrafindo Persada.
- Berkowitz, et al. 2005. “A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy and Environmental Citizenship in Environmental Education.” In *Environmental Education and Advocacy: Perspectives of Ecology and Education*, edited by Dalam E.A.Johnson M.J. Mappin, 227– 266. Cambridge: Cambridge University Press.

- Christoff, P. 1995. *Ecological Citizens and Ecologically Guided Democracy*. Dalam *Brian Doherty and Marius de Geus. Democracy and Green Political Thought: Sustainability, Rights and Citizenship*. Oxford: Routledge.
- Crowson, Nick, and Cs. 2009. *NGOS In Contemporary Britain Non-State Actors In Society And Politics Since 1945*. Palgrave Macmillan. UK.
- Curtin, J F, M Donovan, and T G Cotter. 2002. “Regulation and Measurement of Oxidative Stress in Apoptosis.” *Journal of Immunological Methods* 265 (1–2): 49–72.
- Dobson, A. 2003. *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.
- Fahlevi. 2021. “Internalization of River Culture Literacy Based on Ecological Citizenship at Adiwiyata School.” In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*, 241–243. Atlantis Press.
- Giddens, A. 1993. *Modernity, History, Democracy*. Theory and Society.
- Hidayat, A. 2017. “Konstruksi Gerakan Sosial: Efektivitas Gerakan Lingkungan Hidup Global.” *Jurnal Administrative Reform* 5 (2): 56–68.
- Martono, dan Harjito, D.Agus. 2005. *Manajemen Keuangan*. Pertama. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UI.
- Michener. 1999. *Social Psychology*. Fortworth: Harcourt Brace College Publ.
- Prasetyo, W. H., & Budimansyah, D. 2016. “Warga Negara Dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Peduli Lingkungan Dalam Komunitas Bandung Berkebun.” *Jurnal Pendidikan Humaniora* 4 (4): 177–86.
- Rahman. 2015. “Perencanaan Penggunaan Lahan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Di Wilayah Boliyohuto

- Kabupaten Gorontalo.” Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Silfiana, L., & Samsuri, S. 2019. “Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.” *Jurnal Studi Pemuda* 8 (2): 127–39.
- Smith, M J, and P Pangsapa. 2008. *Environment and Citizenship Integrating Justice, Responsibility and Civic Engagement*. London: Zed Books.
- Sudjatmiko, I G. 2006. *Gerakan Sosial Dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Suwarno, Gowar. 2000. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Dilingkungan Pekerjaan*. Jakarta: Dirjen Sumber Daya Manusia.
- Takashi Inoguchi. 2003. *Kota Dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Lingkungan)*. Jakarta: LP3ES.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Amerika: ambridge University press.
- Walhi. 2020. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*. Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).